SAKALIMA
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN
VOL 3. NO. 3 (2026)

ISSN: 3064-2361

Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Literatur Terstruktur atas Hambatan dan Strategi Intervensi

Krisna Henrialgibran Djadjuli✉, Lucano Farros Naufal✉, dan Faris Ahsan Ghalib✉

To cite this article Djadjuli, K. H., Naufal, L. F., Ghalib, F. A. Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Literatur Terstruktur atas Hambatan dan Strategi Intervensi. *SAKALIMA Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 524–535, 2026. https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i3.529

To link to this article:

Published online: Sept. 23, 2026

Submit your article to this journal

View crossmark data

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
https://journal.wiseedu.co.id/index.php/sakalima/about

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i3.529

SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Vol. 3 No. 3 (2026)

Check for updates

Research Article

Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Literatur Terstruktur atas Hambatan dan Strategi Intervensi

Krisna Henrialgibran Djadjuli, Lucano Farros Naufal, Faris Ahsan Ghalib

Received: 26 Mei 2026	Revised: 25 Agustus 2026	Accepted: 7 September 2026	Online: 23 September 2026

Abstract

Inequality in access to Indonesian higher education remains an important policy concern. This structured, descriptive literature mapping examines barriers and proposed interventions reported in a selected corpus of 16 journal articles from 38 post-deduplication candidates identified by a web search reported for 26 October 2026. Coding was based mainly on abstracts and accessible excerpts; therefore the findings are indicative rather than a systematic estimate of the evidence base. Institutional and governance themes appeared in 14 articles, economic and financing themes in 13, and geographic or infrastructure themes in six. Scholarships or financing support were discussed in 11 articles, improvements in programme governance in 10, affirmative measures in two, and technology and institutional-capacity interventions in one article each. Official survey data contextualize the problem: the higher-education gross enrolment ratio in 2025 was 32.89% nationally, with substantial provincial variation. The synthesis suggests that financial support should be considered together with programme information, targeting, disbursement, and accountability; it does not demonstrate which policy has the largest causal effect. The review contributes an explicitly differentiated map of barriers, policy responses, and unaddressed research questions. Incomplete search logs, inconsistent full-text access, single-person coding, and the lack of formal quality appraisal limit confidence and generalizability.

Keywords: Access Inequality; Higher Education; Indonesia; Policy Implementation; Structured Literature Review

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright:
©
2026 by the author(s).
License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0//).



PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi berperan dalam pembentukan modal manusia dan dapat menghasilkan manfaat individual maupun sosial [1]. Namun, kesempatan menempuh pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada keberadaan kampus, melainkan juga pada kemampuan ekonomi, sumber informasi, latar keluarga, dan kondisi wilayah. Analisis rumah tangga oleh Ogawa dan Iimura [2] menunjukkan keterkaitan antara karakteristik sosial-ekonomi dan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam kerangka Bourdieu [3], ketimpangan modal ekonomi, sosial, dan kultural dapat memengaruhi peluang individu mengakses pendidikan yang bernilai. Dengan demikian, pertambahan kapasitas sistem tidak otomatis menjamin pemerataan kesempatan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi merupakan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan tinggi, tanpa membatasi usia mahasiswa, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia rujukan 19–23 tahun, dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS melaporkan APK pendidikan tinggi nasional sebesar 32,89% pada 2025; Papua Pegunungan (13,34%) dan Papua Tengah (13,62%) berada pada nilai terendah, sedangkan DI Yogyakarta mencapai 74,70% [4]. Terdapat 17 provinsi di bawah nilai nasional. Indikator ini memotret partisipasi, bukan mutu pendidikan atau besarnya peluang diterima, sehingga tidak dapat digunakan sendiri untuk menyimpulkan penyebab ketimpangan.

Istilah kualitas pendidikan tinggi perlu dibedakan dari akses. Mutu dapat dikaji melalui akreditasi, kualifikasi dosen, ketersediaan sumber belajar, dan luaran pembelajaran, yang tidak diwakili langsung oleh APK. Satu uraian sektoral memuat data historis tentang akreditasi institusi dan kualifikasi doktor dosen pada tahun pengamatan berbeda [5]; angka nasional tersebut tidak cukup untuk mengukur kesenjangan mutu antarprovinsi. Studi persepsi mahasiswa pada satu institusi juga menyinggung akses sumber belajar [6], tetapi konteksnya tidak dapat digeneralisasi sebagai ukuran mutu seluruh perguruan tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan mutu sebagai dimensi kontekstual dan kesenjangan bukti, bukan luaran yang diukur secara komparatif.

Penelitian terdahulu cenderung menelaah instrumen kebijakan atau lingkup kelembagaan secara terpisah. Fadhil dan Sabic-El-Rayess [7] mengkaji kebijakan perluasan akses bagi kelompok kurang mampu. Penelitian tentang KIP-Kuliah menyoroti bantuan biaya, ketepatan sasaran, sosialisasi, serta prosedur pencairan [8], [9], [10]. Kajian UKT terutama memusatkan perhatian pada persepsi keadilan dan transparansi pengelompokan biaya [11], [12]. Studi performa magang dari institusi di Jawa dan luar Jawa [13] menyediakan ilustrasi terbatas mengenai perbedaan luaran program, bukan estimasi mutu sistem pendidikan tinggi secara nasional.

Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi adalah belum terintegrasinya, dalam sumber yang ditelaah, pemetaan hambatan akses dengan jenis respons kebijakan serta penilaian terhadap bagian mana yang masih kurang didukung bukti, khususnya faktor geografis dan kapasitas institusi. Kesenjangan ini tidak berarti belum pernah ada tinjauan bertema serupa di luar korpus. Tujuan penelitian ialah menyajikan peta deskriptif literatur dengan membedakan konteks hambatan, respons yang diusulkan atau dievaluasi, dan keterbatasan pengetahuan. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (RQ1) faktor apa yang dibahas sebagai hambatan akses; (RQ2) strategi intervensi apa yang dibahas; dan (RQ3) kesenjangan bukti apa yang muncul dari korpus yang ditelaah.

Kebaruan artikel ini bersifat analitik dan terbatas pada korpus: satu matriks memisahkan kode hambatan (ekonomi, tata kelola, geografis) dari kode respons kebijakan (pembiayaan, administrasi, teknologi, kapasitas institusi, afirmasi), kemudian menghubungkan keduanya dengan tiga pertanyaan penelitian. Pemetaan ini berbeda dari kajian yang hanya mengulas satu program, tetapi tidak mengklaim kerangka tersebut baru secara universal atau membuktikan efektivitas intervensi.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur terstruktur dengan sintesis deskriptif dan pengkodean tematik. Pilihan desain ini sesuai dengan tujuan memetakan tema lintas studi yang berbeda konteks dan metode, bukan menghitung satu ukuran efek gabungan; pendekatan peninjauan yang disesuaikan dengan pertanyaan luas dijelaskan oleh Snyder [14]. Urutan kerja yang dilaporkan adalah identifikasi kandidat, penapisan relevansi, pemberian kode faktor dan strategi, serta sintesis tema. Prinsip transparansi alur seleksi merujuk pada PRISMA 2020 [15], tetapi penerapan pada naskah ini terbatas pada bagian yang dapat ditelusuri. Penelusuran melalui web dan pengkodean oleh seorang penilai tidak otomatis menentukan jenis tinjauan; kelemahan utamanya ialah dokumentasi pencarian dan seleksi yang tidak lengkap serta kedalaman pembacaan sumber yang tidak seragam.

Sumber dan Strategi Penelusuran Literatur

Catatan penelitian menyebut penelusuran pada 26 Oktober 2026, sesuai tanggal dalam abstrak dan keberadaan publikasi 2026 di korpus. Lima dari sembilan kueri yang masih terdokumentasi ialah “ketimpangan akses pendidikan tinggi Indonesia jurnal”, “*higher education inequality Indonesia access regional disparity*”, “KIP Kuliah efektivitas akses pendidikan tinggi”, “UKT biaya kuliah mahal hambatan akses”, dan “disparitas kualitas perguruan tinggi antarwilayah”. Nama mesin pencari, empat kueri lain, parameter pencarian, jumlah hasil per kueri, dan jumlah duplikat yang dihapus belum tersedia dalam bahan penelitian. Angka 38 merujuk pada kandidat setelah penghapusan duplikasi menurut catatan penulis, bukan pada jumlah rekaman awal yang terverifikasi. Oleh sebab itu, strategi pencarian belum dapat direplikasi secara penuh dan tidak dimaknai sebagai pengambilan seluruh literatur relevan.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kelayakan sumber disaring berdasarkan jenis publikasi, periode, fokus, dan kecukupan informasi yang dapat diakses. Tabel 1 merangkum ketentuan inklusi dan eksklusi yang digunakan. Artikel jurnal tentang pendidikan tinggi Indonesia dipertimbangkan untuk pengkodean, sedangkan dokumen statistik, buku, dan berita kebijakan digunakan hanya untuk konteks. Kajian tentang ketimpangan pendidikan lintas jenjang [16] tidak dihitung sebagai bagian korpus karena tidak menganalisis pendidikan tinggi secara khusus.

Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi sumber

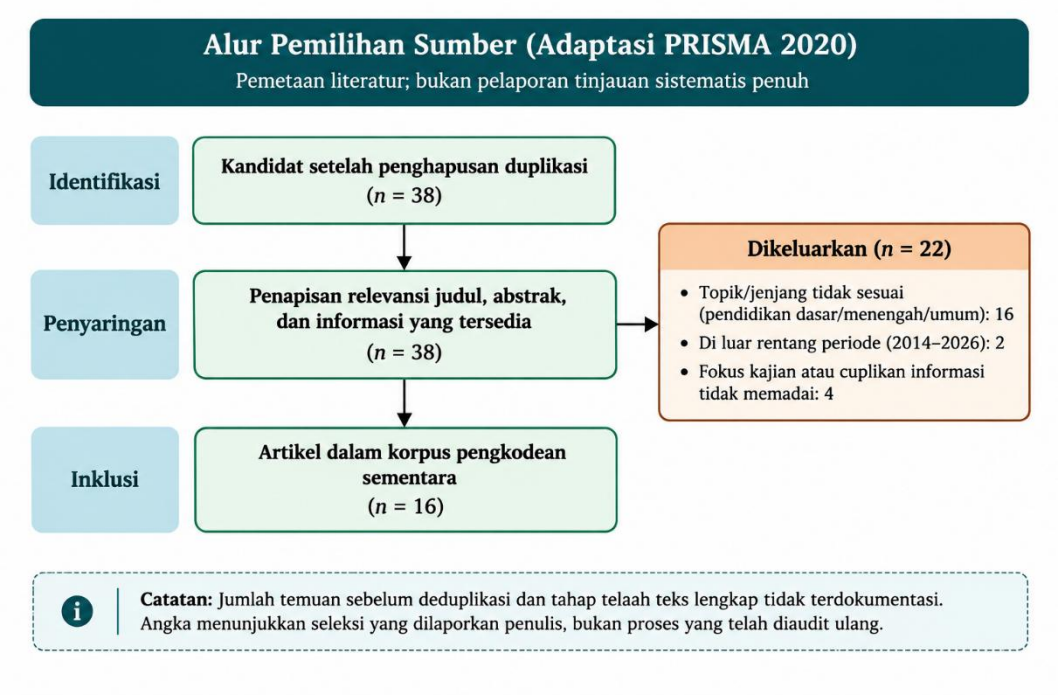
Aspek	Inklusi	Eksklusi
Jenis sumber	Artikel jurnal ilmiah tentang pendidikan tinggi Indonesia	Berita, blog, skripsi, atau dokumen lain untuk korpus artikel
Periode	Publikasi 2014–2026	Publikasi di luar periode

Aspek	Inklusi	Eksklusi
Ruang lingkup	Akses, pembiayaan, tata kelola, kesetaraan, atau dimensi mutu yang terkait akses	Pendidikan dasar/menengah atau pendidikan umum tanpa fokus khusus PT
Ketersediaan informasi	Abstrak atau isi yang memadai untuk pemetaan tema awal	Informasi terlalu terbatas untuk pengkodean

Proses Seleksi Literatur dan Diagram PRISMA

Berdasarkan catatan penapisan, dari 38 artikel kandidat setelah deduplikasi, sebanyak 22 dikeluarkan: 16 tidak secara khusus membahas pendidikan tinggi, dua terbit di luar rentang 2014–2026, dan empat tidak sesuai dengan fokus atau tidak menyediakan informasi memadai. Dengan demikian, 16 artikel dipertahankan sebagai korpus pengkodean deskriptif sementara. Angka tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai 16 artikel yang seluruh teks lengkapnya telah diperiksa, karena dokumentasi penilaian kelayakan berbasis teks lengkap belum tersedia.

Gambar 1 menyajikan alur yang disederhanakan berdasarkan angka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam catatan penelitian. Jumlah identifikasi sebelum deduplikasi, alasan eksklusi pada penilaian teks lengkap, serta jumlah teks lengkap yang berhasil diperoleh tidak dapat direkonstruksi. Oleh sebab itu, gambar diberi label "adaptasi PRISMA 2020" dan tidak memasukkan tahap telaah teks lengkap yang belum terbukti dilakukan. Matriks 16 sumber pengkodean ditampilkan pada Tabel 3.



Gambar 1. Alur seleksi berdasarkan catatan penapisan (adaptasi PRISMA 2020)

Teknik Pengkodean dan Analisis Data

Pemetaan faktor membedakan informasi yang sekadar dilaporkan sebagai konteks, hambatan yang diidentifikasi, dan variabel yang benar-benar dianalisis secara empiris. Kode E diberikan ketika artikel membahas biaya kuliah, pembiayaan, bantuan, atau kondisi ekonomi; K ketika ditemukan isu proses layanan, seleksi, transparansi, pencairan, dan informasi program; serta G ketika terdapat hambatan wilayah, konektivitas, sarana, atau jarak akses. Kode ini merekam

ketercakupan tema dalam sumber, bukan bukti bahwa setiap faktor terbukti berpengaruh secara kausal.

Kode intervensi dibedakan dari faktor: S1 untuk pembiayaan atau beasiswa; S2 untuk perbaikan administrasi dan tata kelola; S3 untuk teknologi pembelajaran; S4 untuk peningkatan mutu/kapasitas institusi pendidikan tinggi; dan S5 untuk afirmasi terarah. Kode strategi mensyaratkan adanya evaluasi atau usulan respons yang dinyatakan secara eksplisit; keberadaan masalah biaya tidak otomatis berarti studi mengevaluasi efektivitas beasiswa. Sebuah artikel dapat memperoleh beberapa kode. Tabel 2 menjelaskan batas operasional setiap kategori; pada tahap pencatatan berikutnya, strategi yang dievaluasi secara empiris perlu dipisahkan dari yang hanya direkomendasikan.

Tabel 2. Ringkasan aturan keputusan pengkodean

Kode	Rumpun	Batas pemberian kode
E	Faktor	Biaya studi, kemampuan ekonomi, pembiayaan, bantuan; tidak otomatis membuktikan dampak.
K	Faktor	Aturan, seleksi, informasi, transparansi, pencairan, layanan dan tata kelola.
G	Faktor	Akses wilayah, konektivitas, sarana dan keterjangkauan geografis.
S1	Respons	Bantuan biaya/beasiswa yang dievaluasi atau disarankan secara eksplisit.
S2	Respons	Usulan atau evaluasi perbaikan tata kelola, proses, dan akuntabilitas.
S3	Respons	Penggunaan teknologi untuk pembelajaran/akses layanan.
S4	Respons	Peningkatan mutu atau kapasitas institusi PT; bukan sekadar pengelola beasiswa.
S5	Respons	Afirmasi eksplisit untuk kelompok kurang terlayani atau wilayah tertinggal.

Pelaksanaan pengkodean yang dapat dikonfirmasi dari naskah menggunakan abstrak, metadata, cuplikan, dan sebagian teks publikasi yang tersedia; bukan pembacaan lengkap yang seragam terhadap 16 artikel. Sintesis tematik diarahkan untuk mengidentifikasi pola antarsumber, dengan acuan umum analisis tema dari Braun dan Clarke [17]. Unit hitung adalah artikel yang menyebut suatu tema, bukan jumlah temuan independen atau jumlah efek teruji. Tidak tersedia lembar ekstraksi per bagian teks, audit kualitas formal, atau kesepakatan antarpengode; akibatnya, frekuensi yang ditampilkan diperlakukan sebagai hasil pemetaan awal yang perlu diuji kembali melalui akses teks lengkap.

Data Pendukung dan Keterbatasan Metodologis

Angka partisipasi pendidikan tinggi dikutip dari BPS [4] sebagai konteks, bukan unit artikel dalam korpus. Literatur konseptual lintas jenjang [16] juga diperlakukan sebagai rujukan konteks. Pembedaan ini diperlukan agar indikator nasional tidak disamakan dengan temuan 16 artikel, dan agar artikel di luar korpus tidak menambah frekuensi pengkodean.

Keterbatasan mutu bukti berbeda menurut desain sumber. Kajian pustaka berpotensi mengutip studi primer yang sama, survei persepsi tidak dapat langsung menggambarkan kondisi nasional, kajian kebijakan membatasi penarikan hubungan sebab-akibat, dan analisis data agregat memerlukan kewaspadaan terhadap kesimpulan tingkat individu. Karena jenis desain, unit analisis, instrumen, dan kualitas pelaporan tidak tersedia secara seragam pada semua artikel, tidak dilakukan penilaian mutu metodologis formal atau pemberian bobot bukti. Satu penilai melakukan penapisan dan pengkodean, sedangkan telaah teks lengkap serta pemeriksaan silang belum terdokumentasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang

dihasilkan hanya berupa pertimbangan konseptual dengan kepastian terbatas, bukan pembuktian efektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebanyak 16 artikel dimasukkan dalam pemetaan tema berdasarkan informasi yang tersedia. Tabel 3 menunjukkan fokus masing-masing sumber dan kode yang tercatat. Sebagai catatan keterlacakan, desain dan sampel tidak selalu dilaporkan cukup rinci pada abstrak atau cuplikan; perbandingan kualitas metodologis per studi karena itu belum dapat dilakukan. Tinjauan pustaka seperti Fitriani et al. [8] tidak diperlakukan sebagai bukti primer tambahan yang independen dari kemungkinan studi rujukannya.

Tabel 3. Matriks 16 sumber dan kategori tema yang teridentifikasi

ID	Artikel, tahun, dan fokus	Faktor	Intervensi
A01	Fadhil & Sabic-El-Rayess [7] — akses afirmatif	E, K	S1, S2, S5
A02	Hasse & Pabbajah [18] — politik pendidikan	G, K	—
A03	Wilfridus et al. [19] — evaluasi pembiayaan	E, K	S1, S2
A04	Z. A. S. et al. [6] — persepsi akses dan mutu	E, K	—
A05	Handayani [20] — mobilitas sosial	E, G	S1, S4
A06	Humaira et al. [10] — tantangan KIP-Kuliah	E, G, K	S1, S2
A07	Fitriani et al. [8] — implementasi KIP-Kuliah	E, K	S1, S2
A08	Lestari et al. [9] — efektivitas KIP-Kuliah	E, K	S1, S2
A09	Sari et al. [21] — evaluasi KIP-Kuliah	E, K	S1, S2
A10	Yusra et al. [22] — pengalaman penerima KIP	E, K	S1, S2
A11	Sussanti et al. [23] — KIP di PTS Palu	E, K	S1, S2
A12	Mustofa et al. [24] — perkuliahan daring	G, K	S3
A13	Fahmi et al. [11] — kebijakan UKT	E, K	S1, S2
A14	Wardani et al. [12] — persepsi UKT	E, K	S1, S2
A15	Ririn & Triani [25] — partisipasi PT	E, G	—
A16	Hakim et al. [13] — kinerja magang MBKM	G, K	S5
∑	**16 artikel**	**E = 13; K = 14; G = 6**	**S1 = 11; S2 = 10; S3 = 1; S4 = 1; S5 = 2**

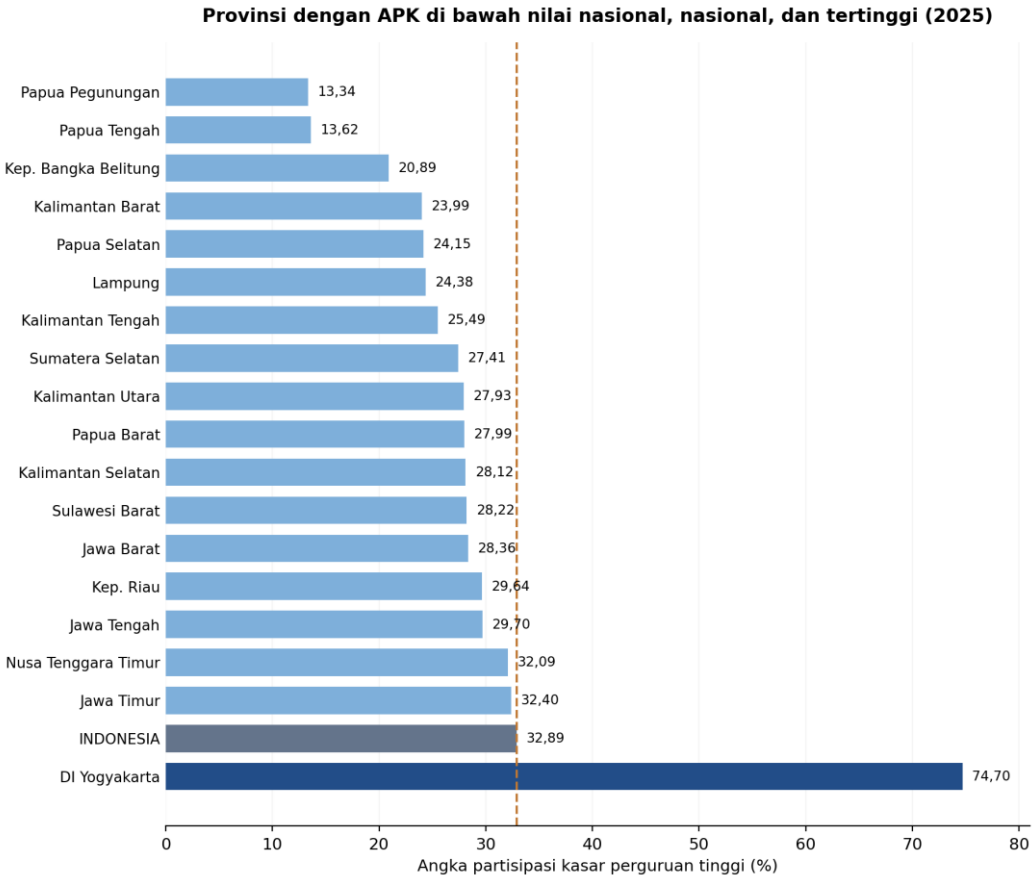
Keterangan: E = ekonomi/pembiayaan; K = kelembagaan/tata kelola; G = geografis/infrastruktur; S1 = bantuan biaya/beasiswa; S2 = perbaikan tata kelola; S3 = pembelajaran digital; S4 = peningkatan mutu/kapasitas institusi; S5 = afirmasi. Tanda (—) berarti strategi tidak dapat diidentifikasi secara memadai; satu artikel dapat memuat beberapa kode.

Data BPS pada Tabel 4 dan Gambar 2 digunakan untuk menempatkan pemetaan literatur dalam konteks perbedaan partisipasi antardaerah pada 2025. Angka-angka ini bukan keluaran analisis tematik dan tidak menunjukkan mutu perguruan tinggi atau penyebab disparitas dengan sendirinya.

Tabel 4. Indikator partisipasi pendidikan tinggi Indonesia (2025)

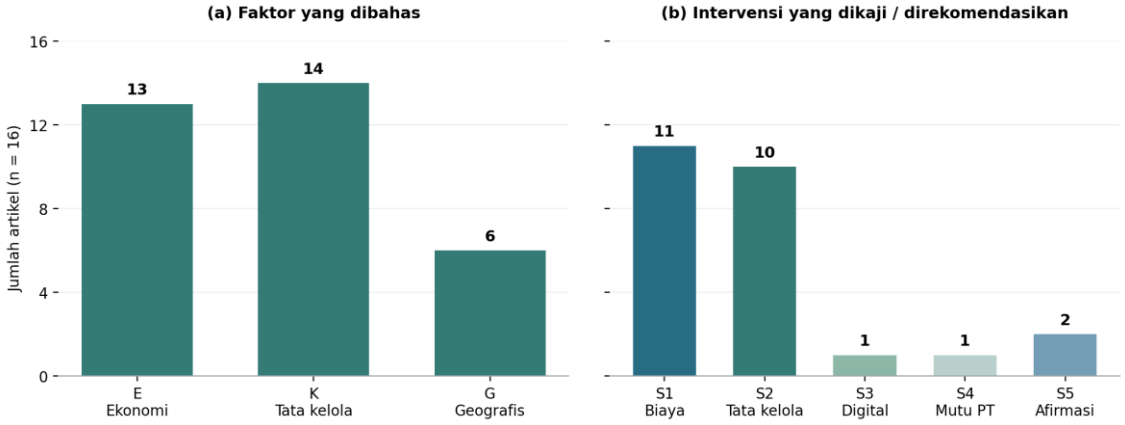
Indikator	Nilai
APK perguruan tinggi Indonesia	32,89%
APK terendah: Papua Pegunungan dan Papua Tengah	13,34% dan 13,62%
APK tertinggi: DI Yogyakarta	74,70%
Provinsi dengan APK di bawah nilai nasional	17 dari 38 provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik [4]; penghitungan jumlah provinsi di bawah rata-rata nasional dilakukan oleh penulis.



Gambar 2. APK perguruan tinggi 2025 pada 17 provinsi di bawah nasional, nilai nasional, dan DI Yogyakarta
Sumber: pengolahan dari tabel BPS (Susenas, 2025) [4]. Garis putus-putus menunjukkan nasional 32,89%.

Pengkodean awal mencatat isu tata kelola (K) pada 14 dari 16 artikel, ekonomi/pembiayaan (E) pada 13, dan geografis/infrastruktur (G) pada enam. Pada kategori respons, S1 tercatat pada 11 artikel, S2 pada sepuluh, S5 pada dua, sedangkan S3 dan S4 masing-masing pada satu artikel (Gambar 3). Nilai ini menggambarkan kemunculan tema di korpus yang dipilih, bukan peringkat dampak, prevalensi hambatan pada populasi mahasiswa, ataupun kualitas bukti. Komposisinya juga dipengaruhi kata kunci penelusuran yang banyak berfokus pada beasiswa dan UKT.



Gambar 3. Frekuensi artikel menurut faktor ketimpangan dan kategori intervensi (n = 16)
Sumber: hasil pengkodean ulang 16 artikel pada Tabel 3; satu artikel dapat menerima lebih dari satu kode. Angka menunjukkan frekuensi tema, bukan efektivitas intervensi.

Kelompok kajian pembiayaan menyoroti biaya langsung, bantuan KIP-Kuliah, dan keadilan penentuan UKT [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Studi kebijakan pembiayaan serta kajian program tambahan dalam korpus menyinggung persoalan ketepatan sasaran dan tata kelola [19], [23], [21], [22]. Dua artikel, termasuk Fitriani et al. [8] dan Wilfridus et al. [19], merupakan kajian kepustakaan; frekuensinya tidak boleh diperlakukan setara dengan jumlah studi lapangan yang independen.

Dalam kelompok tata kelola, masalah informasi beasiswa, kejelasan seleksi, verifikasi berkas, dan pencairan berpotensi menentukan apakah dukungan finansial benar-benar dapat diakses. Namun, sumber yang tersedia tidak memungkinkan pemisahan yang konsisten antara strategi yang baru diusulkan dengan intervensi yang sudah diuji. Karena itu, hasil ini lebih tepat dibaca sebagai peta isu implementasi kebijakan daripada bukti efektivitas setiap program. Penelitian tentang performa magang Jawa dan luar Jawa [13] hanya dapat digunakan sebagai ilustrasi terbatas luaran satu program.

Di luar isu bantuan biaya, Mustofa et al. [24] membahas potensi perkuliahan daring; Handayani [20] menyinggung mobilitas sosial; dan Ririn serta Triani [25] menggunakan data panel 34 provinsi tahun 2020–2024. Naskah sumber terakhir melaporkan arah asosiasi yang tidak selalu intuitif, tetapi koefisien, ukuran ketidakpastian, serta spesifikasi model belum diekstraksi lengkap dan diverifikasi dalam tinjauan ini. Karena itu, arah maupun besaran koefisien tersebut tidak dijadikan dasar rekomendasi atau penjelasan kausal.

Pembahasan

Pemetaan sumber memperlihatkan bahwa kendala keuangan dan tata kelola berhubungan secara konseptual melalui rangkaian keputusan calon mahasiswa: kemampuan membayar, akses informasi, peluang memenuhi persyaratan administrasi, serta kepastian dana ketika studi dimulai. Kondisi ekonomi dapat membatasi pilihan institusi; informasi yang tidak merata dapat menambah biaya pencarian; dan pencairan yang terlambat dapat mengganggu keberlanjutan studi. Mekanisme ini masuk akal dalam kerangka modal ekonomi dan sosial Bourdieu [3] serta temuan rumah tangga Ogawa dan Iimura [2], tetapi hubungan antartahap tersebut belum diuji sebagai model kausal oleh tinjauan ini. Dominasi kode K dan E menunjukkan fokus publikasi yang terjaring, bukan penetapan faktor penyebab terbesar di Indonesia.

Perbedaan antarwilayah dapat menambah ketimpangan melalui biaya transportasi, konektivitas, dan keterjangkauan informasi. Akan tetapi, hanya sebagian sumber memusatkan perhatian pada geografi, dan belum tersedia pengukuran jarak tempuh atau penawaran kampus yang konsisten antardaerah. Data APK BPS [4] menunjukkan variasi partisipasi, sedangkan persepsi pada satu kampus [6] dan hasil magang program tertentu [13] tidak cukup untuk menyimpulkan kesenjangan mutu nasional. Pemisahan akses dari mutu merupakan batas penting agar interpretasi hasil tidak melampaui indikator yang tersedia.

Literatur yang terjaring mengisyaratkan bahwa perluasan bantuan keuangan sebaiknya dibaca bersama mekanisme penyalurannya. Studi kebijakan afirmasi [7], evaluasi KIP-Kuliah [8], [9], [10], [21], [22], dan telaah UKT [11], [12] menyinggung persoalan ketepatan sasaran, komunikasi, transparansi, atau prosedur. Secara konseptual, bantuan hanya dapat mengurangi hambatan ketika calon penerima mengetahui program, mampu menyelesaikan persyaratan, dan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan. Intervensi administratif karena itu dapat berperan sebagai prasyarat berfungsinya bantuan, tetapi korpus ini belum memungkinkan pembandingan efektivitas relatif perluasan anggaran dan perbaikan tata kelola.

Usulan pembelajaran daring [24] dan kebijakan afirmatif menunjukkan alternatif respons di luar bantuan biaya. Potensi digitalisasi bergantung pada ketersediaan perangkat, kualitas koneksi, dan dukungan belajar; teknologi tidak otomatis meniadakan kesenjangan geografis. Demikian pula, afirmasi berbasis wilayah membutuhkan kriteria sasaran yang dapat diperiksa dan evaluasi hasil. Dengan demikian, keluaran yang dapat dipertahankan ialah agenda penilaian kebijakan: uji akses informasi, ketepatan penyaluran, keberlanjutan bantuan, dan hasil belajar lintas wilayah, bukan klaim bahwa satu strategi telah terbukti paling efektif. Informasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di wilayah 3T [26] digunakan sebagai konteks, bukan bukti efektivitas digitalisasi.

Kesenjangan bukti yang tampak mencakup tiga ranah. Pertama, penelitian spasial mengenai asal mahasiswa, waktu tempuh, dan persebaran pilihan perguruan tinggi masih tidak memadai di dalam korpus. Kedua, indikator mutu yang sebanding antardaerah—misalnya distribusi kualifikasi dosen, sumber belajar, dan luaran pembelajaran—belum tersedia dalam sumber yang ditelaah. Ketiga, sedikit studi yang mengevaluasi secara longitudinal efek afirmasi, administrasi bantuan, atau pembelajaran digital. Kesenjangan ini merupakan temuan tentang 16 sumber yang dipilih, bukan bukti bahwa riset semacam itu tidak ada dalam keseluruhan literatur.

Secara metodologis, keterbatasan strategi penelusuran, tidak lengkapnya log kueri, pengkodean oleh seorang penilai, dan telaah yang sebagian besar didasarkan pada abstrak/cuplikan membatasi ketepatan klasifikasi serta kepastian sintesis. Studi primer dan kajian pustaka juga berpotensi memuat bukti yang bertumpang tindih. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu mencatat log pencarian lengkap, memperoleh teks lengkap, mengekstraksi desain dan sampel setiap studi, memeriksa independensi bukti, dan melakukan penilaian mutu yang sesuai. Tanpa tahap tersebut, peta ini terutama dapat dipakai untuk membentuk pertanyaan penelitian dan prioritas pengumpulan data empiris.

KESIMPULAN

Tinjauan ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi dan mekanisme tata kelola sering muncul bersama dalam literatur terpilih tentang akses pendidikan tinggi di Indonesia. Implikasi yang

dapat ditarik secara hati-hati ialah bahwa desain bantuan biaya perlu mempertimbangkan akses informasi, persyaratan administratif, ketepatan sasaran, dan waktu pencairan sebagai satu rangkaian layanan. Bukti yang tersedia belum cukup untuk memberi peringkat efektivitas intervensi ataupun menilai kesenjangan mutu antardaerah, sehingga rekomendasi tersebut masih bersifat konseptual. Kontribusi artikel terletak pada pemisahan peta hambatan, pilihan respons, dan celah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar riset berikutnya. Prioritas selanjutnya ialah evaluasi empiris berbasis asal mahasiswa dan kondisi wilayah, disertai pengukuran mutu institusi yang dapat dibandingkan, serta penguatan protokol penelusuran dan telaah sumber.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden

Krisna Henrialgibran Djadjuli – Program Studi Manajemen Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta (Indonesia);
Email: gibrankrisna53@gmail.com

Penulis

Krisna Henrialgibran Djadjuli – Program Studi Manajemen Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta (Indonesia);
Email: gibrankrisna53@gmail.com
Lucano Farros Naufal – Program Studi Manajemen Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta (Indonesia);
Email: lucanonaufal@gmail.com
Faris Ahsan Ghalib – Program Studi Manajemen Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta (Indonesia);
Email: farisahsan89@gmail.com

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

[1] G. S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001

[2] K. Ogawa and K. Iimura, “Determinants of access and equity in tertiary education: The case of Indonesia,” Excellence in Higher Education, vol. 1, nos. 1–2, pp. 3–22, 2010. https://doi.org/10.5195/ehe.2010.12

[3] P. Bourdieu, “The forms of capital,” in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J. G. Richardson, Ed. New York: Greenwood, 1986, pp. 241–258.

[4] Badan Pusat Statistik, “Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut provinsi, 2025,” BPS, diperbarui 12 Des. 2025, berdasarkan Susenas. Diakses: 9 Nov. 2026.

[5] A. Sutrisno, “Australian-Indonesian university partnerships: Challenges and prospects,” in Experiencing Indonesia: 30 Years of ACICIS, K. Hughes, K. Naidu, and

D. Reeve, Eds. Canberra: ANU Press, 2026, ch. 18. https://doi.org/10.22459/EI.2026.18
[6] Z. A. S., W. Hidayat, S. S. Parebba, and A. R. R. Ilham, "Analisis persepsi mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2021–2023 terhadap akses dan kualitas sumber daya pembelajaran," Hasanuddin Journal of Sociology, vol. 6, no. 2, pp. 88–108, 2024.
[7] I. Fadhil and A. Sabic-El-Rayess, "Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation," Indonesian Journal on Learning and Advanced Education, vol. 3, no. 1, pp. 57–75, 2021. https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376
[8] I. Fitriani, N. Izati, F. Ramadhani, M. S. F. Arnanda, and E. Erinaldi, "Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi," Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 9, no. 3, pp. 34150–34156, 2025. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33231
[9] N. Lestari, K. Sa'diah, and A. Lestari, "The effectiveness of the KIP College Program in supporting student studies," ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan, vol. 4, no. 1, 2026. https://doi.org/10.59246/alfihris.v4i1.1657
[10] C. P. Humaira, I. Ramadhani, I. Nurhasanah, A. R. A. Aziz, A. Soegema, and S. Supriyono, "Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi," Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 8, no. 3, pp. 45314–45320, 2024.
[11] Fahmi, M. R. Bayhaqi, M. R. Wati, A. Olyvia, and A. Mafiroh, "Dinamika politik di balik kebijakan UKT di Prodi MPI UIN Raden Fatah Palembang dalam menimbang ulang keadilan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 11, no. 2, 2026. https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.48468
[12] A. N. Wardani, S. T. Olfah, K. Santoso, and A. Wahyudi, "Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Persepsi mahasiswa pada PTN dan PTKIN BLU," Info Artha, vol. 9, no. 1, 2025. https://doi.org/10.31092/jia.v9i1.3343
[13] L. N. Hakim, D. Winarti, H. S. Kayen, M. Numan, I. C. Buana, and D. Barliana, "Examining educational equity in Indonesia through student performance in the certified emancipated learning internship program," Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, vol. 15, no. 2, pp. 143–157, 2024. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2.4389
[14] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," Journal of Business Research, vol. 104, pp. 333–339, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
[15] M. J. Page et al., "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," BMJ, vol. 372, Art. no. n71, 2021. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
[16] S. F. Rahma and F. Kartiasih, "Pengaruh infrastruktur transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia," Jurnal Ekonomi Indonesia, vol. 13, no. 2, pp. 153–170, 2024. https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.453
[17] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," Qualitative Research in Psychology, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
[18] Hasse J. and M. Pabbajah, "Politik pendidikan Indonesia: Ketimpangan dan tuntutan pemenuhan kualitas sumber daya," Jurnal Darussalam, vol. 10, no. 1, pp. 49–60, 2018. https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267
[19] N. Wilfridus, M. Ahmad, and H. Rochimah, "Evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi: Implikasi bagi kesetaraan sosial," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 10, no. 2, 2025. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27718

[20] S. Handayani, “Pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial di Indonesia,” Journal of Social Studies and Social Science, vol. 1, no. 1, pp. 22–27, 2025.
[21] C. C. P. Sari, N. M. Salsabila, A. Choirunnisa, N. Heysa Q. A., M. H. Fuadi, and J. T. Nugraha, “Analisis program KIP-Kuliah di perguruan tinggi: Studi evaluatif terhadap efektivitas dan tantangan,” JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, vol. 9, no. 1, 2025. https://doi.org/10.31002/jman.v9i1.4614
[22] F. Yusra, A. Sitorus, and Nursaidah HS, “Analisis kebijakan KIP-Kuliah: Tinjauan kualitatif terhadap pengalaman mahasiswa Universitas Malikussaleh angkatan 2022,” Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, vol. 1, no. 11, pp. 944–951, 2024.
[23] Sussanti, M. Syukur, and Syugiarto, “Implementation of Smart Indonesia Card Policy for College at private universities in Palu City,” Khazanah Sosial, vol. 8, no. 1, 2026. https://doi.org/10.15575/ks.v8i1.51273
[24] M. I. Mustofa, M. Chodzirin, L. Sayekti, and R. Fauzan, “Formulasi model perkuliahan daring sebagai upaya menekan disparitas kualitas perguruan tinggi,” Walisongo Journal of Information Technology, vol. 1, no. 2, pp. 151–160, 2019. https://doi.org/10.21580/wjit.2019.1.2.4067
[25] R. A. Ririn and M. Triani, “Analisis partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia,” Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP), vol. 3, no. 2, 2026.
[26] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, “Solusi inovasi pembelajaran di daerah 3T: Ditjen Diktiristek siapkan Mobil PJJ Kampus Merdeka dan mobil vaksinasi,” berita kebijakan.